



PROFIL DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Identitas Instansi

- Alamat: Jln. Tammauni Pue'na Ballung, Komp. KTM Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos: 91563
- Email: distan.mamujutengah@gmail.com
- Website: www.distan.mamujutengahkab.go.id

A. Sejarah dan Perubahan Nomenklatur

Sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah, instansi ini telah bertransformasi beberapa kali guna menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah:

1. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Perkebunan dan Kehutanan (2015–2016)
2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (2016–2017)
3. Dinas Pertanian (2017–2022)
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023–Sekarang)

B. Daftar Pimpinan / Kepala Dinas

Dalam perjalanannya, dinas ini telah dinahkodai oleh beberapa tokoh pimpinan:

1. Ir. Trikora Wahab (2014–2016)
2. Syahrir, S.P. (2017) – *Wafat dalam tugas pada tahun 2017*
3. Ir. H. Ruslan Lazim, M.M. (2017–2020)
4. Muh. Anwar, S.IP., M.M. (2021–2022)
5. Hj. Asmirah Djamal, S.E., M.Si. (2023–2024)
6. H. Bahri, S.IP., M.AP. (2024)

7. Ir. H. Amrullah, MMPub. (2025–Saat Ini)

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, dinas menyelenggarakan fungsi utama:

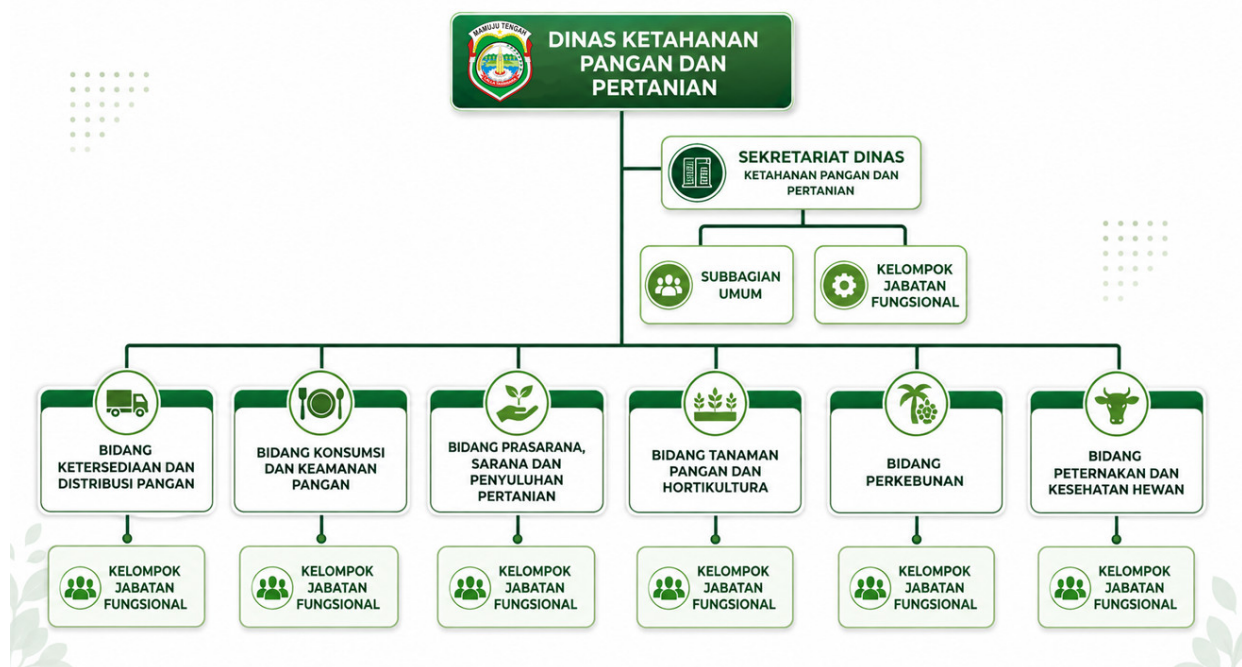
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan.
- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
- Penyusunan program penyuluhan pertanian dan penataan prasarana pertanian.
- Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta sarana pertanian.
- Pembinaan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman (OPT), penyakit hewan, serta penanggulangan bencana alam.
- Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis pertanian.
- Pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas.

D. Susunan Organisasi (SOTK Terbaru 2024)

Berdasarkan Perbup SOTK Perangkat Daerah Tahun 2024, struktur organisasi DKPP dirancang agar lebih ringkas, fungsional, dan lincah, terdiri atas:

1. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - Subbagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Kelompok Jabatan Fungsional)
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (Kelompok Jabatan Fungsional)
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian (Kelompok Jabatan Fungsional)
5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelompok Jabatan Fungsional)
6. Bidang Perkebunan (Kelompok Jabatan Fungsional)
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kelompok Jabatan Fungsional)

E. Struktur Organisasi



F. Visi, Misi, dan Arah Strategis (Renstra 2025–2029)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan sentral dalam mewujudkan Visi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029, yaitu: "Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".

Tujuan Jangka Menengah: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta meningkatnya kesejahteraan petani.

Sasaran Strategis:

1. Terjaganya Keanekaragaman dan Ketersediaan Pangan.
2. Meningkatnya Produksi Pertanian.

G. Kapasitas Sumber Daya (SDM dan Aset)

1. Sumber Daya Aparatur (Update 2026)

Untuk menggerakkan roda organisasi, DKPP terus melakukan penyesuaian personel. Pada awal tahun 2026, terjadi dinamika pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil akibat adanya kebijakan pergeseran status kepegawaian tenaga penyuluh ke instansi Kementerian Pertanian. Saat ini, komposisi SDM yang bertugas di DKPP Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari:

- PNS (Pegawai Negeri Sipil): 29 Orang
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): 3 Orang
- PPPK PW (Paruh Waktu): 112 Orang

Meskipun terjadi pergeseran penyuluh ke pusat, pemetaan aparatur yang ada saat ini terus dimaksimalkan untuk menunjang administrasi, perencanaan daerah, dan fungsi fungsional lainnya di dinas.

2. Aset Kelolaan Daerah Dinas mengelola aset daerah dengan total nilai perolehan mencapai Rp9.228.342.862, yang terdiri dari:

- 28 unit Gedung dan Bangunan (termasuk BPP, Puskesmas, dan Rumah Potong Hewan).
- 45 unit Kendaraan Roda Dua.
- 1 unit Perangkat Lunak (Website Resmi).

- 781 unit Aset Tetap Lainnya (peralatan kantor, perangkat elektronik, dll).

H. Isu Strategis & Program Prioritas 2025–2029

Untuk merespons tantangan pembangunan, DKPP menetapkan 12 Isu Strategis yang menjadi fokus utama, meliputi: keterbatasan pengelolaan air pertanian; belum tersedianya lumbung pangan desa/daerah; tingginya alih fungsi lahan; rendahnya produktivitas komoditas; ketidakstabilan akses pasar dan harga; belum berkembangnya kawasan agropolitan; ketergantungan pasokan pangan luar daerah; minimnya konsumsi pangan B2SA (berkontribusi pada stunting); rendahnya literasi kesehatan hewan; lemahnya penanggulangan OPT dan adaptasi iklim; minimnya regenerasi petani muda; serta terbatasnya akses permodalan dan kelembagaan ekonomi petani.

Guna menjawab isu tersebut, DKPP mengimplementasikan 11 Program Prioritas, yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Perizinan Usaha Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota